

**ANALISIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GADIS)
DI KABUPATEN PESAWARAN**

Dendy Ramadhona Kaligis, Wirman Syafri, Mansyur
Email: dendiramadhona888@gmail.com

Abstract

*This research, in general, would like to describe the implementation of community empowerment by the Regional Government of Pesawaran District through a policy that is the Village Prosperity Movement Program, or often known as the GaDIS Program. This program is installed with a big hope and dream to encourage the village's independence in managing its potential, assets and wealth. The GaDIS Program is a financial stimulant assistance program for the Village Government which will be included as a capital investment for Village Owned Enterprises (BUMDes) of 100 million Rupiah starting in 2017. In this study, the design / research method used by the author is a qualitative method. The data used in this study are qualitative data that is primary data and secondary data. Primary data is processed from observations and interviews. Whereas secondary data was obtained from literature review / documents. The results of this study illustrate the implementation of the GaDIS Program which is well-organized, systematic, based on villages that excel and prioritizes business types or potentials that are based on village deliberations. Indirectly has a positive effect by encouraging some improvements as the goal of community empowerment is defined by Mardikanto (2018: 111), namely improving education, improving accessibility, improving actions, improving institutions, improving business, improving income and improving society. This is at least illustrated in the implementation of the GaDIS Program in 3 (three) villages, namely Wates, Mulyosari and Gunung Rejo, Way Ratai Districts. But on the other hand the lack of institutional strengthening and the low human resource capacity of BUMDes administrators, as well as the low accessibility and actions, also led to low improvements in business, income and community improvement. This was at least experienced by the Caringin Village of Way Ratai District which was found by researchers in the field. Some obstacles faced in the implementation of the GaDIS program are divided into 2 (two) main obstacles, namely: **First:** Internal barriers consisting of limited human resource capabilities, weak BUMDes institutions, distribution delays, lack of optimal monitoring and evaluation, **Second:** External barriers consisting of the absence of BUMDes cooperation and partnership networks, the lack of assistance, and the lack of market access. Determinant factors that strengthen the course of the GaDIS Program include BUMDes management commitment, community awareness and cohesiveness in running the GaDIS program.*

Keywords: Community Empowerment; GaDIS Program; Village Enterprises.



PENDAHULUAN

Mimpi tentang sebuah negara yang sejahtera merupakan angan dan harapan setiap warga negara yang hidup sebagai bagian dari pembangunan yang sejatinya secara imperatif harus dihadirkan oleh Negara. Kesejahteraan sosial yang mencakup pendapatan, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, keseimbangan kerja dan kehidupan sosial, keamanan, jaringan sosial, kepuasan hidup, serta pelibatan masyarakat (*civic engagement*) adalah asa yang dirindukan oleh setiap warga negara yang setidaknya harus dicukupi oleh entitas “penjaga masyarakat” yang kita sebut sebagai Negara. Hal inilah yang kemudian terus mendorong Kabupaten Pesawaran untuk bergeliat dan berjuang dalam menghadirkan serta mewujudkan mimpi kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Kabupaten Pesawaran adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung. Kabupaten ini diresmikan pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki 11 kecamatan yang terdiri dari 144 desa. Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai September 2018 tercatat ada 24,79 juta orang. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 6,69%, turun menjadi 6,56% pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 sebesar 12,85%, turun menjadi 12,60% pada September 2018. Lebih lanjut berdasarkan peta konsentrasi daerah tertinggal, provinsi Lampung masih dikategorikan daerah miskin dan menduduki peringkat kedelapan sebagai daerah termiskin di Sumatera. Pada bulan September 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 1.091,60 ribu orang (13,01 persen), berkurang sebesar 5.45 ribu orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 1.097,05 ribu orang (13,14 persen). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 9,27 persen turun menjadi 9,06 persen pada September 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2018 adalah 14,73 persen pada September 2018.

Perdesaan menjadi konsentrasi kemiskinan karena 14,73 % penduduknya masuk dalam kategori miskin. Sesuai dengan informasi dan data data tersebut dapat diasumsikan bahwa perdesaan memberikan kontribusi tertinggi dalam persentase kemiskinan di Provinsi Lampung. (Data diakses Bappenas.go.id pada Rabu, 18 Oktober 2019). Sesuai dengan asumsi sebagaimana terurai diatas, maka Desa dapat dipandang sebagai entitas yang cenderung akrab dengan kemiskinan, sehingga perlu sebuah pendekatan atau instrumen kebijakan untuk mendorong dan memberdayakan Desa, dalam mengelola apa yang dimiliki secara arif agar dapat menjadi entitas yang lebih maju, tangguh dan mandiri. Berangkat dari semangat serta spirit dalam menghadirkan kesejahteraan tersebut, maka Kabupaten Pesawaran berupaya untuk



menginstalasi dan menginternalisasi semangat tersebut dalam sebuah kebijakan, yang terpotret pada Visi dan Misi Bupati Pesawaran yang ke – 8 yakni “**Mewujudkan Desa Yang Tangguh dan Mandiri**”. Visi dan Misi ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 s.d 2021 (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 - 2021).

Dalam pemenuhan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pesawaran merumuskan suatu program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di desa, secara partisipatif Pemerintah Kabupaten melibatkan Desa untuk membangun kawasannya, yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal, akselerasi pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan pekerjaan dengan menggerakkan dan memberdayakan salah satu instrumen perekonomian lokal yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Didasari oleh latar belakang dan pemikiran yang demikian, Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan kreasi kebijakan melalui suatu program atau gerakan kesejahteraan yang disebut dengan “Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera” (GaDIS). Meskipun dihadapkan pada besaran kapasitas keuangan dalam APBD yang tidaklah besar, namun semangat dermawan Kabupaten Pesawaran untuk mendistribusikan pelayanan publik demi kesejahteraan masyarakat, tetap dijalankan melalui sebuah *milestone* bagi perkembangan ekonomi desa di Kabupaten dengan program GaDIS. Program GaDIS adalah program pemberian bantuan keuangan GaDIS untuk mewujudkan desa tangguh dan mandiri dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat perdesaan dengan mengangkat potensi lokal yang ada di desa menjadi bernilai ekonomis dan inovatif demi kemajuan desa dan terciptanya lapangan kerja. Sebuah program yang diarahkan untuk pemberdayaan dan penguatan BUMDes melalui stimulus atau bantuan keuangan yang mencakup ragam kegiatan ekonomi produktif dan kreatif yang berbasis pada potensi lokal desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Program GaDIS dilaksanakan sejak Tahun 2017, diawali dengan memberikan bantuan keuangan kepada Desa sebanyak 44 Desa dengan besaran bantuan bagi masing masing desa adalah 100 juta, yang kemudian disertakan sebagai modal bagi Badan Usaha Milik Desa. Pada tahun 2017, dari program dan jenis usaha yang diusulkan oleh 44 desa adalah sebanyak 112 jenis usaha dengan komposisi jenis antara lain Peternakan dan Perikanan 28,6%, keuangan mikro 6,3 %, Bank Sampah 1,8% , Jasa 17%, Usaha Bengkel, Air Minuman Kemasan, Usaha Meubel, Wisata serta perdagangan masing masing sebesar 0,9%, lalu kemudian kerajinan sebanyak 6,3 %, kuliner 25%, PAM 1,8%, dan Pertanian sebesar 8%. Dengan pola dan mekanisme yang sama, pada Tahun 2018 program GaDIS juga diberikan pada 44 Desa. Dari program dan jenis usaha yang diusulkan oleh 44 desa adalah sebanyak 98 jenis usaha dengan komposisi jenis antara lain Peternakan dan Perikanan 24, 4 %, keuangan mikro 8,16 %, Jasa 24,4 %, Usaha Bengkel 1,02 %, Air Minuman Kemasan 2,04 %, Wisata 6,12% serta perdagangan 17, 35 %, lalu kemudian kerajinan sebanyak 3,06 %, kuliner 5,10 %, PAM 2,04 %, Pasar Desa 3,06 % dan Pertanian sebesar 3,06 %.



Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan BUMDesa dapat berdaya dan produktif, yang pada muaranya akan menghadirkan atau menghasilkan suatu pendapatan bagi desa, dan kemudian tentunya pendapatan itu akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian dan kesejahteraan Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, desain/metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yang bersifat kualitatif. Informan pada penelitian ini adalah Pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pesawaran, 1 (satu) Pemerintahan Desa yaitu Desa Wates Kecamatan Way Ratai serta 4 (empat) unit Badan Usaha Milik Desa yaitu BUMDes Desa Wates, Desa Mulyo Sari, Desa Gunung Rejo dan Desa Ceringin Asri. Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, diperlukan beberapa narasumber/informan yang dapat memberikan gambaran situasi dan kondisi yang sebenarnya. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

HASIL PENELITIAN

Analisis Program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS) di Kabupaten Pesawaran

Pelaksanaan Program GaDIS

Visi dan misi tentang penguatan desa juga muncul dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran. Desa di wilayah Kabupaten Pesawaran diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan untuk mengelola potensi atau kekayaan yang dimilikinya. Adalah dengan melalui suatu program yang disebut sebagai Gerakan Desa Ikut Sejahtera, atau yang lebih dikenal oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran sebagai Program GaDIS. Maksud dan Tujuan dari Program GaDIS adalah mewujudkan sebuah desa tangguh dan juga mandiri, yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, melalui pengelolaan potensi lokal yang ada di desanya masing-masing secara inovatif menjadi bernilai ekonomis, sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan desa serta terciptanya lapangan kerja.

Pada tahun 2017 Program GaDIS diberikan kepada 44 Desa yang tersebar pada 11 Kecamatan. Masing-masing desa mendapatkan bantuan keuangan sebesar Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah*). Desa yang memperoleh bantuan keuangan adalah desa yang memperoleh nilai tertinggi dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Berprestasi di tingkat Kecamatan/Kabupaten/Provinsi/Nasional.
- b. Memiliki RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDDesa.
- c. Memiliki tertib manajemen administrasi pemerintahan desa menurut standar evaluasi perkembangan desa.



- d. Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terakhir.
- e. Dalam hal tidak terdapat desa yang lunas PBB, maka akan mempertimbangkan desa dengan capaian PBB tertinggi.
- f. Penyusunan APBDesa dan pelaporan realisasi APBDesa secara tepat waktu.
- g. Memiliki BUMDesa yang lengkap secara administrasi, meliputi Berita Acara Pembentukan, Peraturan Desa tentang BUMDesa, AD/ART, rencana usaha dan struktur organisasi yang proporsional serta Sumber Daya Manusia yang professional.
- h. Melaksanakan sistem keamanan lingkungan
- i. Memiliki perencanaan inovatif yang sinkron dengan program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
- j. Bersedia menandatangani Pakta Integritas.

Prinsip-prinsip dari bantuan keuangan GaDIS menurut Pasal 6 Perbup Pesawaran Nomor 49 Tahun 2017, antara lain :

- a) *Inisiatif*, bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan harus berasal dari usulan yang direncanakan oleh masyarakat desa itu sendiri.
- b) *Partisipatif*, bahwa dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mengedepankan partisipasi dan keterlibatan masyarakat secara aktif baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan.
- c) *Demokratis*, bahwa dalam penentuan kegiatan yang akan direncanakan ditentukan dan diputuskan secara bersama oleh masyarakat. *Manfaat*, bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.
- d) *Gotong Royong*, bahwa pelaksanaan kegiatan yang direncanakan mampu mengedepankan rasa gotong royong dan kebersamaan dari seluruh lapisan masyarakat.
- e) *Berkelanjutan*, bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat dipelihara dan dilestarikan oleh masyarakat sendiri.

Desa penerima Program GaDIS adalah desa yang secara teknis, administratif dan substantif layak, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan Program Desa Maju Andan Jejama Gerakan Desa Ikut Sejahtera Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Pesawaran. Prinsip utama dari Program GaDIS adalah memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola potensi dan kekayaan desa, dengan tujuan jenis usaha yang dikelola adalah sesuai potensi dan kebutuhan yang ada di desa. Sehingga masyarakat maupun Pemerintah Desa dapat memperoleh manfaat dan insentif yaitu kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat berdaya dan menjadi mandiri. Agar supaya usaha tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat maka dalam rangka untuk memastikan Desa hal dimaksud, desa yang



ditetapkan sebagai penerima bantuan keuangan dari program GaDis harus melaksanakan hal sebagai berikut :

- a. Musyawarah desa untuk merumuskan kegiatan yang diusulkan berdasarkan ruang lingkup pemanfaatan dengan format berita acara musyawarah desa.
- b. Mengusulkan kegiatan yang telah dirumuskan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GaDIS melalui Camat.

Musyawarah menjadi instrumen yang efektif karena terdapat kesejajaran dan kesamaan hak bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait hal hal yang dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian desa. Ada beberapa Kepala Desa yang mengeluhkan terkait tidak terdapatnya potensi Desa untuk dikembangkan oleh BUMDes di wilayahnya. Setiap Desa tentunya memiliki potensi atau karakter kekayaan desa yang berbeda atau tidak bakal sama persis, sehingga tidak akan tepat atau cocok dengan Desanya apabila hanya meniru usaha yang sudah dijalankan oleh Desa tetangga atau desa lainnya. Usulan yang telah dipersiapkan atau dirumuskan oleh Desa kemudian disampaikan kepada Tim Koordinasi Bantuan Keuangan GaDIS melalui Camat. Pada level Pemerintah Kecamatan, Camat beserta Tim kemudian melalui verifikasi administrasi, kelayakan usaha serta juga melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah jenis usaha yang diusulkan oleh desa penerima bantuan GaDIS adalah merupakan jenis yang sesuai kebutuhan desa ataupun potensi yang harus dikembangkan di desa.

Pada tingkatan Sekretariat Tim Koordinasi, seluruh usulan yang disampaikan kemudian diverifikasi dan divalidasi kembali kelengkapan administrasinya dan dikaji kembali terkait kelayakan usaha desa yang diusulkan. Hasil verifikasi dan validasi Sekretariat Tim Koordinasi dirumuskan Berita Acara Verifikasi untuk dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi GaDIS yang melibatkan seluruh unsur satuan kerja terkait yang berada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dan seluruh Camat. Selanjutnya hasil Rapat Tim Koordinasi GaDIS akan dituangkan kedalam Berita Acara dan kemudian disampaikan kepada Bupati untuk dilakukan koreksi. Fase koreksi oleh Bupati sangat krusial karena menyangkut langsung pada esensi GaDIS sebagai manifestasi derivatif Visi dan Misi kepemimpinan Kepala Daerah.

Masyarakat mengetahui program GaDIS dari pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Langkah sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat, Pemerintah Desa dan BUMDes memahami tentang apa itu Program GaDIS, tujuan manfaat dan hal lainnya. Sosialisasi dibantu juga oleh Pendamping Desa dan Kepala Desa dengan menyampaikan informasi tentang Program GaDIS kepada masyarakat dan pengurus di setiap pertemuan yang dilaksanakan oleh Desa. Dalam menjalankan usahanya, Desa atau BUMDes juga sering dihadapkan pada persoalan apakah peluang usaha yang dijalankan akan dibeli oleh masyarakat? Siapa yang mau membeli layanan atau produk usaha mereka?, ada kesulitan untuk mendefinisikan siapa yang akan membeli produk-produknya. Sesuai wawancara dengan Tenaga Ahli Pendamping Profesional Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal, bahwa BUMDes masih banyak



yang belum memiliki pengetahuan terkait analisis potensi atau usaha, pengembangan jejaring kemitraan dan penguatan akses pasar dan keuangan.

Di kesempatan yang sama Pemerintah Daerah juga mengidentifikasi bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh BUMDes adalah minimnya kapasitas pengurus akan pengetahuan terhadap pengembangan BUMDes. Oleh karenanya sejak akhir tahun 2018 dan dilanjutkan pada awal tahun 2019, Pemerintah Daerah telah menyelenggarakan beberapa kali pelatihan untuk peningkatan kapasitas pengurus BUMDes di Kabupaten Pesawaran. Materi pelatihan yang diberikan antara lain adalah pemahaman tentang BUMDes, tujuan dan motivasi pembentukan BUMDes, pemetaan potensi dan Pemilihan Usaha yang salah satunya adalah dengan metode bentang alam, ketrampilan mengasah indera untuk mengetahui kesempatan bisnis serta penyusunan model bisnis dan kelayakan usaha. Dengan adanya pelatihan tersebut, sudah banyak BUMDes cukup baik dan aktif pengurusnya dalam mengembangkan unit usahanya.

Pelatihan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun banyak desa yang secara mandiri berinisiasi melaksanakan peningkatan kapasitas pengurusnya. Salah satu contohnya adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai. Pada pelatihan BUMDes diberikan materi teori dan praktek tentang gambaran umum Bumdes dan manajemen Bumdes. Peserta juga dibekali materi manajemen kewirausahaan, pengembangan potensi bisnis di desa dengan pendekatan model bisnis, perencanaan usaha dan pelaporan keuangan sederhana. Pelatihan setidaknya telah memberikan peningkatan dan perbaikan pendidikan (*better education*) dalam mengelola usaha dan bisnis di BUMDes. Pengurus setidaknya dapat menjalankan beberapa strategi penguatan dan pemasaran dari beberapa pengetahuan yang diperoleh.

BUMDes yang mencoba menerapkan strategi yang didapatkan dari pendekatan peningkatan kapasitas antara lain BUMDes Wates. Tentunya cukup bermanfaat dan efektif, setidaknya BUMDes Wates yang telah melaksanakan panen raya pertama atas usaha lelenya sebanyak 3 ton, dan mendapatkan keuntungan yang signifikan, karena langsung disambut atau dibeli oleh masyarakat dan pengusaha kuliner yang ada di kecamatan way ratai serta sekitarnya bahkan sudah juga dipesan oleh Usaha Kuliner yang berada di ibu kota Bandar Lampung. Keberhasilan Desa Wates dalam usaha lele, menjadi pemacu semangat bagi setiap Desa yang menerima bantuan Program GaDIS. Mereka sangat antusias dalam berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, dikarenakan dukungan yang sangat besar dari Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program GaDIS dapat berjalan dengan baik, pada setiap tahapan proses program tersebut dilakukan pendampingan oleh Pemerintah Daerah secara langsung dengan melibatkan unsur Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). Tenaga Pendamping Profesional Program Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) selain menjalankan fungsi mereka yaitu menjalankan fungsi pendampingan untuk memfasilitasi pemerintahan desa dan masyarakat, dalam melaksanakan tahapan



program/kegiatan sejak tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan berbagai kegiatan pembangunan wilayah pedesaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di Kabupaten Pesawaran oleh Pemerintah Daerah didorong dan diminta untuk turut serta dalam memastikan proses pelaksanaan Program GaDIS.

Dengan keterlibatan Tenaga Pendamping Profesional (P3MD), setidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya ketidakakuratan usulan desa yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pemerintah Kecamatan menjadi sangat terbantu dengan adanya dukungan dari Tenaga Pendamping Profesional (P3MD) terutama dalam penetapan desa desa yang akan menerima GaDIS karena kondisi desa desa benar benar melalui proses pengamatan yang terukur. Desa yang akan menerima Program GaDIS diminta untuk mengidentifikasi potensi dan kebutuhan strategis di wilayahnya dan kemudian dimusyawarahkan bersama masyarakat dan BPD untuk menentukan dan menyepakati usaha apa yang akan dikembangkan melalui Program GaDIS.

Dalam proses indentifikasi usaha, Pemerintah Desa juga melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk menganalisa dan mengidentifikasi potensi atau kekayaan desa apa yang harus dan dapat dikelola melalui program GaDIS. Dalam memastikan program GaDIS agar dapat berjalan optimal, Kabupaten Pesawaran melalui Tim Terpadu yang dimotori oleh Dinas PMD Kabupaten Pesawaran melaksanakan pendampingan kepada masing-masing desa baik itu dari perencanaan, verifikasi dan validasi data sampai dengan tahapan implemetansi program GaDIS. Pemantauan dan evaluasi terkait dengan program GaDIS dilaksanakan tiga (3) bulan sekali setelah desa menerima bantuan stimulan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), untuk memastikan penggunaan dana dari program GaDIS apakah sesuai dengan rencana bisnis yang di usulkan oleh masing-masing desa. Lebih dari itu pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi persoalan ataupun hambatan yang di hadapi oleh BUMDesa dalam menjalankan usahanya yang di biayai oleh program GaDIS. Hal ini sebagai mana diungkapkan dalam wawancara dengan salah satu tim pelaksanaan evaluasi yaitu tenaga professional P3MD yang membidangi pengembangan ekonomi desa (TA - PED).

Berdasarkan pengamatan peneliti, secara umum program GaDIS di terima dengan baik oleh masyarakat karena tujuan dari kebijakan ini diinstalasi, adalah untuk mewujudkan masyarakat dan desa yang tangguh serta mandiri. Program GaDIS ini boleh dikatakan sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Pesawaran untuk mewujudkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran, sekaligus dalam rangka meningkatkan kesadaran para masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan mereka dalam mengelola potensi serta kekayaan desanya, dan semuanya bermuara pada tujuan akhir yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Produk Usaha yang akan dikembangkan oleh Desa, didorong untuk mengembangkan potensi dan kekayaan desa, sehingga benar benar bermanfaat bagi masyarakat di desa. Dari pengamatan lapangan oleh peneliti, Program GaDIS secara tidak langsung menstimulus kebersamaan antar Desa, dengan membangun



sinergi antar Desa melalui kerjasama antara Desa sehingga produk ataupun usaha yang dikembangkan juga dapat bermanfaat Desa yang lain. Dikarenakan salah satu Desa dapat saja tidak memiliki potensi yang ada namun di wilayahnya dibutuhkan produk dari desa lain. Salah satu contohnya adalah Desa Wates Way Ratai yang mengembangkan usaha jual beli ikan lele, yang segmentasi pasarnya adalah desa lain yang masyarakatnya menjalankan usaha warung, namun tidak memiliki potensi penghasil ikan lele, sehingga dikerjasamakan dengan desa lain terkait pembelian produk lele. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan pasar bagi Desa Way Ratai terutama BUMDes Bersatu, dan menghasilkan pendapatan desa serta berguna untuk kemashalatan masyarakat Desa.

Kami menjalankan usaha ikan lele, karena selain kami memiliki potensi pengembangan, namun karena segmentasi pasar yang telah ada dari desa lain, karena sudah bekerjasama dengan kami untuk pembelian ikan lele guna distribusi bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pengembangan usaha, proses untuk mendapatkan kepercayaan pembeli terhadap produk atau usaha yang dikembangkan oleh BUMDes sebagai pelaksanan program GaDIS adalah hal yang penting. Tahapan dalam memasarkan sebuah produk adalah hal sangat fundamental, karena ujung tombak dalam usaha mendapatkan pendapatan. Konsep yang dikembangkan oleh beberapa Desa, yaitu salah satunya adalah Desa Wates Way Ratai dengan BUMDesnya dengan melalui pengembangan kemitraan. BUMDes Wates Way Ratai membangun jejaring kerjasama dengan pelaku usaha kuliner yang berada di wilayah Kecamatan Way Ratai. Disini terjadinya penguatan kelembagaan atau *better institution*. Dengan pengembangan kemitraan secara kelembagaan BUMDes Wates Way Ratai telah memastikan adanya aksesibilitas pasar yang menjadi instrumen dalam mendapatkan pendapatan. Sesuai dengan konteks tujuan pemberdayaan, setidaknya program GaDIS secara teknis, berhasil mendorongnya adanya *better income* bagi Desa Wates Way Ratai.

Kondisi yang demikian juga terjadi pada Desa Mulyosari dan Desa Gunung Rejo, yang dalam pelaksanaannya juga telah berhasil mendapatkan pendapatan untuk Desanya melalui pengembangan usaha air minum serta cetak sablon, dan disaat yang bersamaan Desa Gunung Rejo juga mendapatkan hasil dari pengembangbiakan atau ternak sapi. Hasil yang didapatkan oleh ke-3 (tiga) desa tersebut, secara singkat menunjukkan bahwa ada perubahan atau setidaknya perbaikan yang diperoleh oleh Desa dalam pemberdayaannya melalui Program GaDIS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan program GaDIS jika dilaksanakan secara baik, juga setidaknya mendorong adanya beberapa perbaikan sebagaimana tujuan pemberdayaan masyarakat yang didefinisikan oleh Mardikanto (2018 :111) yaitu perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan dan perbaikan masyarakat. Hal tersebut setidaknya digambarkan dalam pelaksanaan Program Gadis di 3 (tiga) desa yaitu Desa Wates, Mulyosari dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai.



Hambatan Pelaksanaan Program GaDIS

Pelaksanaan program GaDIS bukannya tidak mengalami hambatan. Temuan pada penelitian juga menunjukkan bahwa adanya ruang yang perlu perbaikan untuk mengoptimalkan keseluruhan operasional dan dampak dari Program GaDIS. Kurangnya penguatan kelembagaan dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia pengurus BUMDesa, aksesibilitas dan tindakan menjadikan juga terjadi rendahnya perbaikan akan usaha, pendapatan dan perbaikan masyarakat. Hal ini setidaknya dialami oleh Desa Caringin Kecamatan Way Ratai yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Berdasarkan pengamatan peneliti dan melihat beberapa aspek tertentu dalam program ini bekerja, beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program GaDIS adalah sebagai berikut :

1. Proses penguatan kelembagaan BUMDes yang masih minim.
2. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan pengurus BUMDes dalam berusaha.
3. Rendahnya komitmen dari Kepala Desa dalam menjalankan program.
4. Kualitas dan Mutu Produk Usaha.
5. Masih minimnya jejaring kemitraan dan kerjasama antar BUMDes.
6. Tidak adanya akses pasar yang memadai.
7. Keterlambatan proses implementasi dan penyaluran program GaDIS.
8. Masih terbatasnya inisiatif Pengurus BUMDes untuk mengelola potensi yang ada di Desa.
9. Minimnya SDM OPD terkait untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan sehingga keberlangsungan usaha BUMDes dapat selalu dipantau agar meminimalisir kerugian maupun mal-administrasi pengelolaan.
10. Belum optimalnya tugas pokok dan fungsi Tim Koordinasi GaDIS sebagai organ pengelola Program untuk mensinergiskan masing-masing kewenangan OPD terkait.
11. Belum berfungsinya Perguruan Tinggi dalam hal ini Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung sebagai *quality control* GaDIS yang sangat vital dan strategis untuk memberikan rekomendasi dan saran kritis agar Bantuan Keuangan GaDIS benar-benar termanifestasi sebagai kebijakan Pemerintah Daerah yang menopang pencapaian Desa Tangguh dan Mandiri.

Faktor Determinan Pelaksanaan Program GaDIS

Sedangkan secara determinis, berdasarkan kajian peneliti bahwa terdapat beberapa faktor yang pendukung keberhasilan BUMDes dalam mengelola usaha yang didanai melalui Bantuan Keuangan GaDIS, diantaranya:

1. Komitmen Pengurus BUMDes dalam mengelola Bantuan Keuangan GaDIS agar terlaksana berdasarkan rencana usaha.



2. Terbangunnya relasi dan intensitas komunikasi Pengurus BUMDes dengan Tim Koordinasi GaDIS melalui Kecamatan.
3. Pemahaman Kepala Desa terhadap urgensi Program GaDIS sebagai stimulus yang memacu semangat Desa untuk menjadikan BUMDes sebagai lokomotif perekonomian di Desa.
4. Kesadaran masyarakat Desa mendukung implementasi Program GaDIS.
5. Dukungan dari entitas Pendamping Desa dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Provinsi Lampung.
6. Kohesi sosial antar komponen masyarakat sehingga mengantisipasi kemungkinan timbulnya kepentingan politik praktis.
7. Pengurus BUMDes terbuka terhadap wawasan dan pengetahuan baru dari beragam media.
8. Semangat Pengurus BUMDes dalam menjalankan usaha yang didanai Bantuan Keuangan GaDIS.
9. Sebagai salah satu program unggulan, GaDIS memiliki sisi prestise sehingga membangun kolektifitas untuk menyuksekannya.
10. Desa dan BUMDes yang telah menerima Bantuan Keuangan GaDIS sangat berharap bahwa ada program lanjutan yang mendukung kemajuan BUMDes melalui skema pendanaan dan pembinaan yang lebih maksimal.

Upaya yang dilakukan dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Program GaDIS

Strategi atau kegiatan yang dapat diupayakan dan diterapkan untuk mengatasi hambatan pemberdayaan masyarakat melalui Program Gerakan Desa Iktu Sejahtera (GaDIS) Kabupaten Pesawaran

1. Memberikan Sosialisasi yang massif terkait tujuan dan manfaat Program Gadis. Sosialisasi dilaksanakan melalui media cetak, pertemuan terbatas dan kolektif, media sosialisasi – banner serta desiminasi informasi akan pentingnya pengembangan ekonomi lokal melalui Program GaDIS oleh Pendamping Desa di Kabupaten Pesawaran.
2. Mengadakan dan mendorong pelaksanaan pelatihan baik secara mandiri oleh desa atau oleh akademisi dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pengembangan BUMDes.
3. Peningkatan Komitmen Kepala Desa dan Pengurus BUMDes melalui pengawasan dan pembinaan yang ketat baik secara internal dan eksternal oleh Inspektorat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Akademisi serta Aparat Penegak Hukum.
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Produk melalui program kemitraan usaha dengan pelaku usaha baik di dalam maupun di luar Kabupaten Pesawaran, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
5. Menyelenggarakan peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDes. Pemerintah Kabupaten Pesawaran telah beberapa kali melaksanakan bimbingan teknis atau pelatihan pengembangan dan penguatan manajemen BUMDes bagi pengurus



BUMDes dengan menghadirkan praktisi dan tutor yang berpengalaman dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Antara lain dari penggiat desa ataupun Pendamping Desa, akademisi dari Universitas Lampung dan Bandar Lampung. Materi dalam peningkatan banyak menyentuh persoalan bagaimana pengurus BUMDes memahami beberapa hal antara lain adalah perumusan potensi untuk pemilihan jenis usaha, penyusunan AD/ART, pengetahuan tentang akses pasar dan pengelolaan keuangan serta pengembangan jejaring BUMDes.

6. Memberikan pengetahuan dan kesadaran Kepala Desa. Pengetahuan dan kesadaran Kepala Desa menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan Program GaDIS dalam berjalan dengan efektif dan efisien. Karena keputusan politik, sosial dan ekonomi di tingkat sangat tergantung pada *sprit, political* dan *good will* dari Kepala Desa.
7. Membuat jejaring pemasaran. Salah satu langkah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah menjajagi kerjasama dengan Kantor Pos Indonesia Perwakilan Lampung serta Bank Lampung dalam hal pemasaran. Kedua entitas tersebut memiliki aplikasi *star-up* yang berfungsi untuk *e-commerce* sebagai etalase dalam pemasaran atas produk produk yang dimiliki oleh BUMDes. Kerjasama ini sedikit banyaknya meringankan energi Desa atau BUMDes dalam memasarkan produk-produknya.
8. Kebijakan Satu Desa Satu Tujuan Wisata (*One Village One Destination*). Kebijakan Satu Desa Satu Tujuan Wisata (*One Village One Destination*) diselenggarakan selain desain kebijakan yang besar, namun secara tidak langsung menguatkan program GaDIS yang merupakan program pengembangan ekonomi desa dari sisi mikro. Dengan kebijakan ini setiap desa akan mengetahui potensi wisata yang dimiliki, serta dapat mengidentifikasi kelemahan kelemahan yang dimiliki oleh setiap desa dalam mengembangkan tempat wisatanya. Dengan demikian setiap desa selain dibantu secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten, namun masing masing akan sadar terhadap setiap kelemahannya serta terdorong untuk berkolaborasi antar desa untuk mengatasi permasalahannya. Kekurangan di masing masing desa akan dirasionalisasi di Program GaDIS sehingga setiap desa dapat terarah dalam mengoptimalkan aset dan potensi yang dimilikinya.
9. Bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi adalah agen perubahan yang menjadi instrumen penting dalam perubahan sosial di masyarakat. Atas dasar pandangan tersebut, Pemerintah Kabupaten bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi untuk dapat melakukan fungsi pendampingan antara lain Lembaga Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung.
10. Memperkuat Monitoring dan Evaluasi Program. Pemerintah Kabupaten Pesawaran tentu saja harus memastikan bahwa program GaDIS dapat berjalan efektif dan efisien. Melalui Monitoring dan Evaluasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pesawaran serta pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat, Program Gadis dapat diselenggarakan tepat sasaran.



Strategi dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berangkat dari semangat untuk melakukan perubahan dan peningkatan serta efisiensi kegiatan pemberdayaan. Dengan memberikan penguatan dan melindungi masyarakat, Program GaDIS dibingkai secara sengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* ditingkatkan Musdes dan menjamin haknya terselenggara dengan menjaga relasi BUMDes dengan Kepala Desa agar komit terhadap penguatan BUMDes. Pemerintah Kabupaten Daerah juga memberikan ruang serta menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakatnya berkembang (*enabling*). Peningkatan kapasitas pengurus BUMDes adalah upaya untuk membangun daya serta kapasitas pengurus sehingga terjadi perubahan sosial, ekonomi dan politik melalui belajar bersama pada diri semua stakeholders (*individu, kelompok dan kelembagaan*) yang terlibat dalam proses pembangunan demi tewujudnya masyarakat desa yang semakin berdaya, mandiri dan partisipatif sehingga Desa dapat sejahtera secara berkelanjutan. Kegiatan Studi Banding yang dilaksanakan oleh Bupati Pesawaran secara tidak langsung juga mendorong, meningkatkan motivasi dan membangkitkan kesadaran Kepala Desa akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya melalui Program GaDIS.

PENUTUP

Pelaksanaan program GaDIS dilaksanakan secara baik, setidaknya mendorong adanya beberapa perbaikan sebagaimana tujuan pemberdayaan masyarakat yang didefinisikan oleh Mardikanto (2018 :111) yaitu antara lain adalah perbaikan pendidikan, perbaikan aksesibilitas, perbaikan tindakan, perbaikan kelembagaan, perbaikan usaha, perbaikan pendapatan dan perbaikan masyarakat. Hal tersebut setidaknya digambarkan dalam pelaksanaan Program Gadis di 3 (tiga) desa yaitu Desa Wates, Mulyosari dan Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai. Namun disisi lain kurangnya penguatan kelembagaan dan rendahnya kapasitas sumberdaya manusia pengurus BUMDesa, serta rendahnya aksesibilitas dan tindakan, menjadikan juga terjadi rendahnya perbaikan akan usaha, pendapatan dan perbaikan masyarakat. Hal ini setidaknya dialami oleh Desa Caringin Kecamatan Way Ratai yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Pemerintah Kabupaten Pesawaran melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu terus melakukan peningkatan kapasitas manajerial Pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes dengan lebih baik sehingga mampu menghasilkan nilai lebih bagi Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad KM, Mansyur., 2018, "*Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa – Perspektif Regulatif dan Aplikatif*", Balai Pustaka, Jakarta
- Nazir, Moh., 2005, "*Metode Penelitian*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko., 2017 "*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik* " Alfabeta, Bandung.



- Mulyawan, Rahman, 2016, "*Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan*", Unpad Press, Bandung.
- Pitana, I Gde, 2011, "*Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata*", Pustaka Larasan, Bali.
- Silaen, Sofar MM., 2014, "*Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*". In Media. Jakarta.
- Suharto, Didik G., 2016, "*Membangun Kemandirian desa* ", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiyono., 2017, "*Metodologi Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*", Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi , 2009 "*Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat – Kajian Strategis Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*", Refika Aditama, Bandung.
- Sujarweni , V. Wiratna., 2015, "*Implementasi Undang Undang – Akuntansi Desa “ Panduan Tata Kelola Keuangan Desa ”*", Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan dan Wulandari, Ari, 2016, "*Membangun Indonesia dari Desa* ", Media Pressindo, Yogyakarta.
- Sutoro Eko dkk., 2014, "*Desa Membangun Indonesia*". Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta.
- Suryanto, Rudy 2018, "*Peta Jalan BUMDes Sukses*". PT Syncore Indonesia, Yogyakarta.
- Syafri, Wirman dan Silalahi, Uber, 2015, "*Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik – Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif, dan Akuntabel*". IPDN Press, Bandung.
- Widjajanti, Kesi (2011) "*Model Pemberdayaan Masyarakat*" – Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12.

